

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang saling berhubungan yang melakukan suatu kesepakatan yaitu pihak *principal* atau pihak yang memberikan kewenangan dan pihak *agent* atau pihak yang menerima kewenangan Halim dan Abdullah (2006) dalam Hanifatus Samhah (2018). Dalam teori keagenan di sektor publik, pihak *principal* adalah masyarakat dan pihak *agent* pemerintah daerah. Sebagai pihak *agent*, pemerintah daerah tentu memiliki informasi yang lebih banyak dan terperinci dibandingkan dengan masyarakat. Sedangkan masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Kondisi ketidakseimbangan informasi ini dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan maupun korupsi yang dilakukan oleh pihak *agent*. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pengendalian intern atas kinerjanya dan pemerintah dituntut untuk meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah sehingga informasi yang diterima masyarakat dari pemerintah daerah menjadi lebih

terpercaya agar dapat meminimalisir penyelewengan yang terjadi dan dapat mengurangi kondisi ketidakseimbangan informasi.

Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah menjadikan informasi yang diterima masyarakat lebih berimbang, yang artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Kemungkinan untuk melakukan korupsi jadi lebih kecil dikarenakan semakin berkurangnya *information asymmetry* (Puspitasari 2013).

## **2. Sistem Pengendalian Intern**

### **a. Pengertian Pengendalian Intern**

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319. Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku.

Menurut COSO (*Comitte of Sponsoring Treadway Organization Comission*) menjelaskan bahwa, pengendalian intern dipercaya dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya. Pengendalian intern dapat

menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja, serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Komponen pengendalian intern meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan yang dilakukan. Ada empat tujuan organisasi yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi yang memadai dalam pencapaian tujuan tertentu yang saling berkaitan. Penerapan pengendalian intern dalam suatu entitas diharapkan akan mengurangi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan, misalnya penggelapan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

**b. Tujuan Pengendalian Intern**

Pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan dengan tetap menjaga keuangan negara agar tetap efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, lembaga atau organisasi wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian tersebut dilakukan atas dasar sistem pengendalian intern pemerintah yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada. Arens (2012) dalam Puspitasari (2013) tujuan dari pengendalian intern ada 3, yaitu:

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

**c. Komponen Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, menerapkan lima komponen pengendalian intern terdiri dari :

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Pengendalian resiko
- 3) Prosedur pengendalian
- 4) Pemantauan pengendalian
- 5) Sistem informasi

**d. Kelemahan Pengendalian Intern**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga

pemerintah yang independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah serta mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Menurut Puspitasari (2013), Kelemahan pengendalian intern tersebut didapatkan dengan melihat tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Hasil audit tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama sebagai berikut :

- 1) Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
  - a) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
  - b) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
  - c) Entitas terlambat menyampaikan laporan
  - d) Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat
  - e) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya yang memadai
- 2) Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD terdiri dari:
  - a) Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan

- b) Penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
  - c) Perencanaan kegiatan tidak memadai
  - d) Penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan atau pendapatan
  - e) Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN/APBD
  - f) Penetapan atau pelaksanaan kebijakan tidak tepat  
Atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya atau belanja
- 3) Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terdiri dari:
- a) Entitas tidak memiliki prosedur standar operasional formal
  - b) Prosedur standar operasi yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati
  - c) Entitas tidak memiliki satuan pengawas internal
  - d) Satuan pengawas internal yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal
  - e) Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

#### **e. Indikator Kelemahan Pengendalian Intern**

Indikator kelemahan pengendalian intern merupakan hasil audit yang dilakukan oleh BPK untuk menilai sejauh mana pengendalian intern pemerintah daerah telah dilaksanakan

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Hanifatus Samhah, 2018).

Menurut *Public Company Accounting Oversight Board*, kelemahan pengendalian intern merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Adanya indikator untuk mengetahui tingkat kasus kelemahan pengendalian intern menjadikan Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kualitas pengendalian intern. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK dijelaskan bahwa kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern. Kelemahan pengendalian intern merupakan kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tiga kelompok kelemahan pengendalian internal antara lain :

- 1) Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan,
- 2) Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja,
- 3) Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

### **3. Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran Pemerintah Daerah merupakan sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah (Hartono

2014). Berbicara mengenai ukuran, maka kita akan dihadapkan pada permasalahan seberapa besar atau seberapa kecil objek yang akan kita ukur. Dalam organisasi pemerintah yang berskala besar relatif lebih stabil tingkat keuangannya jika dibandingkan dengan organisasi kecil. Selain itu tingkat kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada organisasi dengan ukuran besar cenderung lebih kecil, dikarenakan organisasi yang memiliki ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang memadai serta pengawasan yang baik.

Ukuran pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi peneliti menggunakan proksi populasi penduduk karena setiap provinsi mempunyai jumlah penduduk yang berbeda dan jumlah anggarannya, hal ini menjadi permasalahan dalam memajukan wilayahnya berdasarkan indikator jumlah penduduk. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dalam setahun dan jumlah penduduk. Total pendapatan suatu daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah (Kristanto 2009).

Dalam Konteks Pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang besar pula. Besarnya sumber daya yang dimiliki suatu daerah



memungkinkan daerah tersebut untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tekanan politis yang dialami oleh birokrasi pemerintah daerah yang besar cenderung lebih tinggi sehingga membuat para birokrat harus lebih transparan dalam pengelolaan keuangan (Laswad *dkk* 2005 dalam Kristanto 2009). Sedangkan menurut (Baber 2010 dalam Hartono 2014) ukuran organisasi atau entitas dalam hal ini pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah penduduk.

**a. Indikator Ukuran Pemerintah Daerah**

Hartono (2014) menggunakan populasi jumlah penduduk sebagai Indikator dari ukuran, alasan ini sangat sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan: jumlah penduduk menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan akan anggaran untuk setiap daerah berbeda-beda, misalnya daerah yang mempunyai jumlah penduduk besar akan memperoleh jumlah anggaran yang tidak sama dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit.

Penggunaan proksi populasi penduduk karena setiap daerah mempunyai jumlah penduduk dan jumlah anggaran yang berbeda-beda, hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal memajukan daerahnya dengan indikator jumlah penduduk.

Semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar pula pendanaan yang digunakan untuk layanan publik dan permasalahan yang timbul dari daerah tersebut juga semakin kompleks.

#### **4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Windhu Putra (2018:150) PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dalam hal ini diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menciptakan sumber pajak atau retribusi daerah yang baru, sehingga kemajuan suatu daerah akan dapat tercapai dengan baik.

Kristanto (2009) PAD memiliki peranan penting dalam membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan yang dimiliki daerah untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah yaitu dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### **a. Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Hanifatus Samhah 2018) dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

### **5. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-

hari suatu satuan kerja, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud Prof. Erlina (2015:155).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar (BAS), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapat belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap, Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan kepada masyarakat yang memberikan dampak jangka panjang secara *financial* (Ardhani 2011).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, komponen pengeluaran yang dapat digolongkan ke dalam belanja modal adalah pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Setiap tahun anggaran pemerintah daerah pasti akan melakukan pengeluaran yang bernama belanja modal, hal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerahnya, Belanja modal sendiri seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Setiap daerah akan memanfaatkan pemasukan dari potensi yang dimilikinya untuk menyusun rencana belanja modalnya. Setiap daerah mempunyai sumber pemasukan untuk belanja modal yang berbeda-beda dan alokasi belanja modal yang berbeda-beda pula. Latar belakang dari setiap daerah akan menentukan arah dari alokasi dari dana belanja modalnya. Ardhani (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan alokasi belanja modal adalah

pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Halim dan Abdullah (2006), alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melakukan pengadaan aset tetap. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja, ada satuan kerja yang menyediakan sarana dan prasarana fisik seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, perpustakaan), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain ada yang hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan dan pelayanan kesehatan.

Agar alokasi dari dana belanja modal yang dimiliki suatu daerah dapat tepat sasaran dan tujuan utama dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa tercapai maka perlu adanya sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan atau kontrol harus diterapkan dalam rangka untuk meminimalisir anggaran belanja modal yang bocor sehingga merugikan keuangan daerah.

#### **a. Indikator Belanja Modal**

Hanifatus Samhah (2018) Indikator variabel belanja modal diukur dengan: 1) Belanja Tanah, 2) Belanja Peralatan dan Mesin, 3) Belanja

Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan 5) Belanja Aset Tetap lainnya.

## 6. Kompleksitas Daerah

Kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya (Hartono 2014). Kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya yaitu mengimplementasikan pengendalian intern.

Kompleksitas pemerintah daerah menjadi penentu terjadinya kelemahan pengendalian intern. Doyle *et al* (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan kompleksitas tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian intern yang tinggi pula.

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk. Jumlah SKPD menjadi salah satu ukuran kompleksitas pemerintahan daerah. Jumlah SKPD juga menjadi pertimbangan dalam melihat tingkat kebutuhan pelayanan umum di suatu daerah. Penelitian ini menggunakan jumlah kecamatan sebagai prokis dari kompleksitas daerah. Kecamatan

diibaratkan menjadi anak cabang dalam pemerintah daerah kabupaten/kota. Banyaknya jumlah kecamatan yang ada dalam suatu daerah diduga akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pengendalian intern. Masalah yang muncul adalah dalam hal penyatuan laporan keuangan

(Martani dan Zaelani 2011). Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda.

Puspitasari (2013) kompleksitas tugas dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu :

1. Kompleksitas komponen

Kompleksitas komponen mengacu pada jumlah komponen informasi yang harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap rumit jika informasi yang harus diproses jumlahnya semakin banyak.

2. Kompleksitas Koordinatif

Kompleksitas koordinatif mengacu pada jumlah koordinasi atau hubungan antar bagian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit ketika pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan lainnya.



### **a. Indikator Kompleksitas Daerah**

Hartono (2014) dalam Hanifatut Samhah (2018) Indikator Kompleksitas Daerah dapat diukur dengan jumlah kecamatan. Banyaknya jumlah kecamatan yang ada di suatu daerah akan menyebabkan sulitnya mengimplementasikan pengendalian intern dari suatu daerah.

Kesulitan ini dialami karena setiap kecamatan yang ada di suatu daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Banyaknya jumlah kecamatan yang ada di suatu daerah juga akan membebani tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pengawasan. Selain itu masalah yang timbul dari banyaknya jumlah kecamatan adalah pada saat pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah (Martani dan Zaelani 2011).

### **B. Penelitian Sebelumnya**

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) menguji ukuran pemerintahan, PAD, dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal secara bersama-sama signifikan mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Secara parsial, ukuran pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap

kelemahan pengendalian intern. Sedangkan variabel PAD menunjukkan arah hubungan yang negatif tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Demikian juga dengan variabel belanja modal yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian yang dilakukan oleh Petrovits dkk (2010) menguji pengaruh PDRB dan kompleksitas terhadap pengendalian intern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern pada organisasi nirlaba memiliki hubungan positif dengan kondisi keuangan lemah, sedang tumbuh, lebih kompleks, dan berukuran kecil.

Penelitian oleh Martani dan Zaelani (2011) menguji pengaruh ukuran, tingkat pertumbuhan, PAD, dan jumlah penduduk terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Pertumbuhan pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Kompleksitas pemerintah daerah yang diwakili oleh PAD secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Sedangkan jumlah kecamatan dan jumlah penduduk tidak menjadikan pemerintah daerah lebih kompleks dalam implementasi sistem pengendalian intern.

Penelitian Hartono (2014) meneliti pengaruh pertumbuhan, size, PAD, dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara bersama-sama pertumbuhan, size, PAD, kompleksitas berpengaruh pada kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Pengujian secara parsial menunjukkan pertumbuhan dan size memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian Dian Eka (2016) meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, kompleksitas dan belanja modal secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian Hanifatus Samhah (2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern, sedangkan

kompleksitas daerah dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian M. Safery dan Erly Mulyani (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

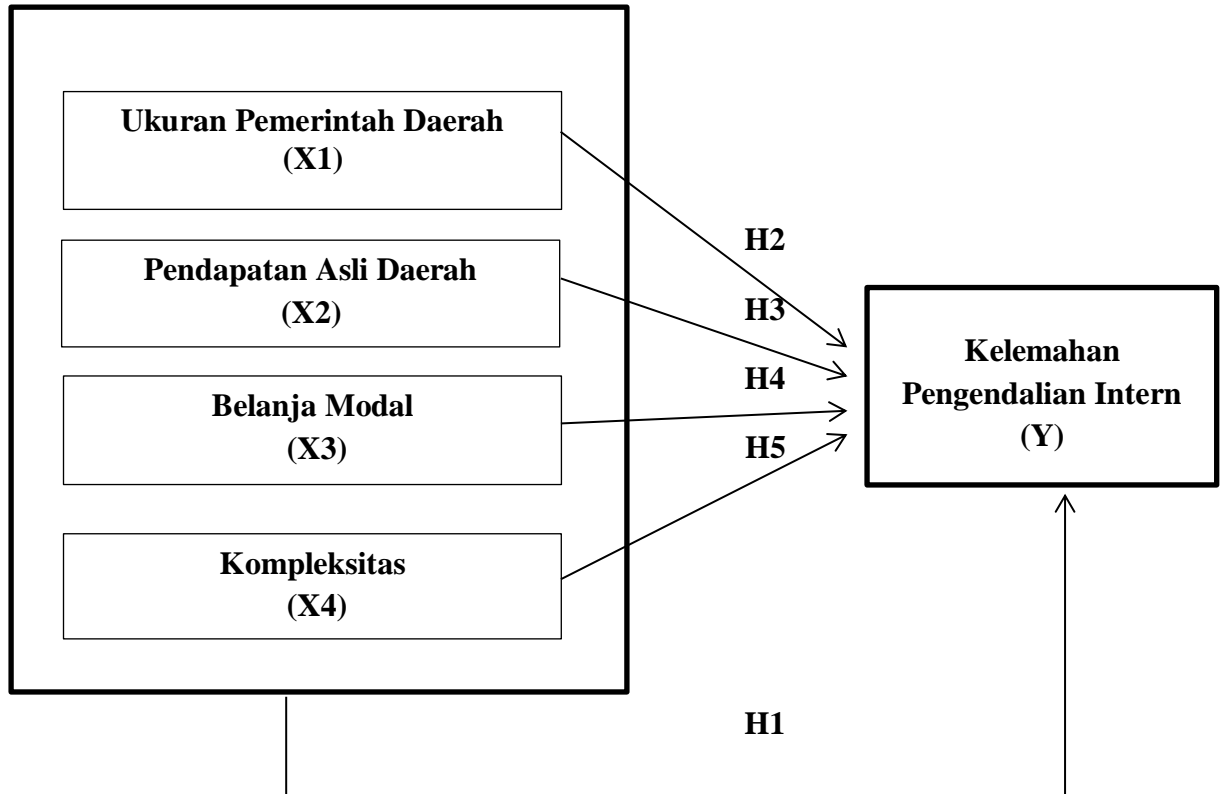
**Tabel II.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya**

Peneliti/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
Kristanto (2009) Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern	- Variabel Dependen: Pengendalian Intern - Variabel Independen: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Belanja Modal - Data yang digunakan: Data sekunder	Variabel Independen : 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Kompleksitas
Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) Penyebab dan Dampak dari Defisiensi Pengendalian Intern Pada Sektor Nirlaba	- Variabel Dependen: Pengendalian Intern - Variabel Independen: Kompleksitas - Alat Analisis: Regresi Berganda	- Variabel Independen: 1. Going concern 2. Opini laporan keuangan 3. Keuntungan perusahaan - Ruang Lingkup: Penelitian sekarang menggunakan sampel Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Petrovits, Shakespeare, dan Shih menggunakan sektor organisasi nirlaba
Martani dan Zaelani (2011) Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Indonesia	- Variabel Dependen: Pengendalian Intern - Variabel Independen: 1. Ukuran Pemerintah 2. Kompleksitas - Alat Analisis: Regresi Berganda	- Variabel Independen: Pertumbuhan Pemerintah Daerah - Ruang Lingkup: Menggunakan Sampel Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia
Hartono, Rudi. (2014) Pengaruh Pertumbuhan, Size, PAD dan Kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah	- Variabel Dependen: Pengendalian intern - Variabel Independen: 1. Ukuran 2. PAD 3. Kompleksitas	- Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi - Ruang Lingkup: Menggunakan Sampel Pemerintah Provinsi se Indonesia

<p>Dian Eka (2016)  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dependen: Pengendalian Intern</li> <li>- Variabel Independen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Pemerintah</li> <li>2. PAD</li> <li>3. Kompleksitas</li> <li>4. Belanja Modal</li> </ol> </li> <li>- Data yang digunakan: Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Ruang Lingkup: Menggunakan sampel pemerintah Provinsi Jawa Timur</li> </ul>
<p>Hanifatus Samhah (2018)  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dependen: Pengendalian Intern</li> <li>- Variabel Independen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD</li> <li>2. Kompleksitas</li> <li>3. Belanja Modal</li> </ol> </li> <li>- Data yang digunakan : Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Ruang Lingkup: Menggunakan sampel pemerintah Provinsi Jawa Timur</li> </ul>
<p>M. Safery dan Erly Mulyani (2020)  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dependen: Pengendalian Intern</li> <li>- Variabel Independen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD</li> <li>2. Ukuran Pemerintah Daerah</li> <li>3. Kompleksitas</li> </ol> </li> <li>- Data yang digunakan: Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen: Belanja Modal</li> <li>- Ruang Lingkup: Menggunakan sampel pemerintah Provinsi Sumatera Barat</li> </ul>

Sumber: Penulis 2021

### C. Kerangka Pemikiran



**Gambar II.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan di atas, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari berbagai asumsi yang ada di atas adalah:

1. Ukuran pemerintah daerah, PAD, Kompleksitas dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah (H1)
2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah (H2).
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah (H3).
4. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah (H4).
5. Kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah (H5).



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ditinjau menurut tingkat eksplansinya (Diah, 2019:18), yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengetahui nilai variabel mandiri (bisa satu variabel atau lebih), tanpa menghubungkan kondisi satu variabel dengan variabel yang lain, melihat pengaruh antar variabel, atau membandingkannya.

2. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bermaksud mengetahui keterkaitan antar variabel. Apabila keterkaitan tersebut hanya menjelaskan hubungan maka jenis penelitiannya adalah kolerasional.

3. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang membandingkan antara satu sampel dengan sampel yang lain, baik perbandingan tersebut dilakukan secara bebas (*independent*) maupun secara berpasangan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiasif. Penelitian asosiasif ialah untuk mengetahui hubungan atau variabel faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kelemahan pengendalian internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat Jl. Kapten A. Rivai No.51, Sungai Pangeran, Kec Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.

### **C. Operasionalisasi Variabel**

Sugiyono (2018:39) operasional variabel atau variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Y)	Diukur dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa jumlah temuan kasus penyimpangan atau pelanggaran terhadap SPI dalam Pemerintah Daerah.	Jumlah temuan/ kasus kelemahan sistem pengendalian intern	Rasio

Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Total pendapatan asli daerah Log N	Rasio
Ukuran Pemerintah (X2)	Ukuran pemerintah dalam suatu daerah dapat menggambarkan besar kecilnya skala pemerintah tersebut.	Jumlah penduduk Log N	Rasio
Belanja Modal (X3)	Belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembentukan modal atau aset untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Total belanja modal Log N	Rasio
Kompleksitas (X4)	Sebuah tingkatan deferensiasi yang ada pada pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.	Jumlah kecamatan	Rasio

Sumber: penulis 2021

#### **D. Data yang Diperlukan**

V.Wiratna (2020:89) sumber data menurut cara memperolehnya antara

lain :

## 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan, buku, laporan pemerintah, artikel, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh dari website ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal yang diperoleh melalui website ([www.bpkad.sumselprov.go.id](http://www.bpkad.sumselprov.go.id)) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota diwilayah Sumatera Selatan. Sedangkan data jumlah kecamatan dan jumlah penduduk diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan ([www.sumsel.bps.go.id](http://www.sumsel.bps.go.id)).

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut (Diah, 2019:106) macam - macam teknik pengumpulan data adalah:

### 1. Angket

Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data dimana responden mengisi pertanyaan/pertanyaan, kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti) dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atau pertanyaan yang diberikan kepada responden.

### 3. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data menggunakan panca indera, jadi tidak hanya pengamatan menggunakan mata instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan, laporan, catatan dan lain-lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, laporan hasil pemeriksaan BPK atas pemerintah daerah, PAD, jumlah penduduk dan jumlah kecamatan yang dijadikan objek penelitian.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Menurut V.Wiratna (2020:89) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

#### **a. Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif adalah suatu analisis data yang di kelompokkan ke dalam tabel frekuensi berdasarkan karakteristik dan dinyatakan dalam frekuensi persentase.

#### **b. Analisis Kuantitatif**

Analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang berkaitan dengan angka, uji statistik dan disesuaikan dengan rumusan atau indentifikasi yang di teliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil data 2017-2019.

## **2. Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun serta menganalisis dari penyajian data yang akan digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota, laporan hasil pemeriksaan BPK atas pemerintah daerah, PAD, jumlah penduduk dan jumlah kecamatan yang dijadikan obyek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini di bantu oleh *program for special sciene* (SPSS) maka terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik.

### **a. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang di gunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:147).

Statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai obyek yang di teliti. Data yang dilihat dari nilai *minimum, maximum, mean*, standar deviasi dan jumlah data.

### **b. Uji Asumsi Klasik**

#### **1) Uji Normalitas Data**

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai

residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residu yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variable tetapi pada nilai residunya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, Skewness dan kurtosis atau uji Kolmogorow Smimow. Tidak ada metode yang buruk atau tidak tepat. Tips pengujian dengan menggunakan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi diantara beberapa pengamatan. Dikatakan normal apabila nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikansi yang ditetapkan (Albert Kurniawan, 2014:156).

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya



tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Uji multikolinearitas dilakukan bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Albert Kurniawan, 2014:157). Beberapa kriteria untuk mendeteksi multikolinearitas pada suatu model sebagai berikut:

- a) Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0.1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas, semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.
- b) Jika nilai koefisien korelasi antara masing-masing variabel.

- c) Jika nilai koefisien determinasi, baik nilai  $R^2$  diatas 0.60, namun tidak ada variabel dependen, maka diasumsikan model terkena multikolinearitas.

### **3) Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heterokedastistas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji stastistik ini yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Rho Spearman, Uji park.

### **4) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah adanya kolerasi antar anggota sampel atau dua pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. Autokorelasi muncul karena ada observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan rumus *Durbin Watson* sebagai berikut.

$$dw = \frac{\sum e^n - e_{n-1}}{\sum e^2_n}$$

Keterangan:

dw = Nilai Durbin Watson

e = Y - Ŷ

n = Jumlah sampel

Hasil dari rumus tersebut dibandingkan dengan tabel Durbin Watson. Di dalam tabel tersebut dimuat dua nilai batas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk berbagai nilai n dan k (jumlah variabel bebas). Jika  $dU < dw < 4 - dU$ , maka tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif di dalam model persamaan regresi. Panduan untuk mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1)  $dw < dL$ , berarti ada autokorelasi positif (+).
- 2)  $dL < dw < dU$ , tidak dapat disimpulkan.
- 3)  $dU < dw < 4 - dU$ , berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 4)  $4 - dU < dw < 4 - dL$ , tidak dapat disimpulkan.
- 5)  $dw > 4 - dL$ , berarti ada autokorelasi negatif (-).

Uji Autokorelasi Menurut Imam Ghozali (2016,:107) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode untuk

menguji autokorelasi ini adalah metode Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

1. Angka DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

### **c. Uji Hipotesis**

#### **1) Analisis Regresi Linear Berganda**

Menjelaskan bahwa analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dampak dari penggunaan analisis linier berganda dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan atau menurunkan keadaan variabel independen atau untuk meningkatkan variabel indenpenden dan sebaliknya (Romie, 2017:154).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kelemahan pengendalian intern

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien regresi

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X3 = Belanja Modal

X4 = Kompleksitas

e = Tingkat Kesalahan (error)

## 2) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sering pula disebut dengan koefisien determinasi majemuk (*multiple coefficient of determination*) yang hampir serupa dengan r, tetapi keduanya berbeda dalam fungsi (kecuali regresi linier sederhana).  $R^2$  menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terkait (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas lebih dari satu variabel ( $X=1,2,3,4,\dots,k$ ) secara bersama-sama. Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Anwar Sanusi, 2011: 136).

### 3) Uji F

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas ( $X_1, X_2$ ) Secara bersama – sama terhadap variabel tidak bebas ( $Y$ ). langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut Menurut (Slamet Riyanto, 2020:313).

#### a) Merumuskan hipotesis

hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$H_0$  : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Belanja Modal Dan Kompleksitas Secara Bersama - Sama Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

$H_a$  : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Belanja Modal Dan Kompleksitas Secara Bersama - Sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

#### b) Menentukan Tarif Nyata

tarif signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) =  $n-k-1$ , taraf nyata ( $\alpha$ ) berarti nilai F tabel, taraf nyata dari F tabel di tentukan dengan derajat bebas (db) =  $n-k-1$ .

c) kesimpulan

Menarik kesimpulan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima.

**4) Uji t**

Ghozali (2013), tujuan pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel penjelasan (independen) secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Membandingkan antara *p value* dengan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat ditentukan apakah  $H_0$  ditolak atau diterima ( $H_0$  diterima apabila  $p\ value > 0,05$ ,  $H_0$  ditolak apabila  $p\ value < 0,05$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan sebagai berikut :

a)  $H_{o2}$  : Ukuran Pemerintah Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

$H_{o2}$  : Ukuran Pemerintah Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

b)  $H_{o3}$  : Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

$H_{a3}$  : Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

c) Ho4 : Belanja Modal Tidak Berpengaruh Signifikan  
Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Ha4 : Belanja Modal Berpengaruh Signifikan  
Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

d) Ho5 : Kompleksitas Tidak Berpengaruh Signifikan  
Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Ha5 : Kompleksitas Berpengaruh Signifikan Terhadap  
Kelemahan Pengendalian Intern



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Tentang Provinsi Sumatera Selatan**

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini didirikan pada tanggal 12 September 1950. Awalnya provinsi ini mencakup Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Akhirnya keempat wilayah tersebut menjadi provinsi tersendiri yang mandiri. Pada tanggal 17 Juni 683 Masehi didirikan pemukiman dengan nama Sriwijaya dan akhirnya berkembang menjadi kerajaan.

Pada abad 7-12, Kerajaan Sriwijaya tumbuh dan berkembang hingga puncak kejayaannya. Pada tahun 1292, masa kejayaan Sriwijaya mulai pudar sejak diserang oleh kerajaan Siam. Akhirnya berdirilah Kesultanan Palembang pada abad ke 16 yang berkedudukan di Sungai Musi. Kesultanan ini didirikan oleh seorang pelarian politik dari Demak, yaitu Ki Gedeng Suro pada abad ke 17, kesultanan ini mulai berhadapan dengan Belanda. Belanda berhasil menaklukan kesultanan ini setelah menaklukan Seltan Ahmad Najamuddin pada tahun 1825. Dibawah kekuasaan Belanda kesultanan berubah menjadi Karesidenan.

Semangat kebangsaan mulai menggugah pada awal abad 20, yang ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan kebangsaan.

Semangat ini semakin berkobar semenjak Indonesia mendeklarkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yaitu semangat mempertahankan kemerdekaan. Saat itu, Sumatera Selatan masih merupakan sebuah karesidenan dan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Presiden Soekarno menunjuk A.K. Gani sebagai residen dan bertanggung jawab kepada Teuku Muhammad Hasa Gubernur Sumatera saat itu.

Belanda belum puas dan melancarkan serangan ke Sumatera Selatan pada 1 Januari 1947. Upaya mempertahankan kemerdekaan terjadi selama 5 hari 5 malam. Sekali lagi Belanda gagal menguasai Sumatera Selatan tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran diseluruh pertahanan perjuangan Indonesia, termasuk Sumatera Selatan serangan ini dinamakan Aksi Militer I, yang menyebabkan pusat Karesidenan Sumatera Selatan pindah dari Palembang ke Lahat.

Kemudian Aksi Militer II dilancarkan Belanda dan berhasil menduduki Ibukota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta dan daerah lainnya termasuk Sumatera Selatan. Selama menduduki Sumatera Selatan, Belanda membentuk Negara Sumatera Selatan dan sebagai wali Negara ditunjuk Abdul Malik.

Negara Sumatera Selatan tidak berlangsung lama, pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali terbentuk. Akhirnya Sumatera Selatan menjadi satu Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

a. Visi

- 1) Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat
- 2) Kondisi meningkatnya dimana anggota SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggota pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
- 3) Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hidup orang banyak.
- 4) Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

## b. Misi

- 1) Berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, professional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
- 3) Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan refonsif.
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infastruktur, termasuk infastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancarkan arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing saerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah,
- 5) Meningkatnya kehidupan beragam, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui

kegiatan olahraga sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religious.

## **2. Sejarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan**

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bernama Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten Arivai No.3 Palembang, Biro Keuangan berdiri sejak adanya Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).

Berkembangnya pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, maka titik berat pembangunan diarahkan ke daerah dan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah mana arah pembangunan dititik beratkan di daerah, maka struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Sekarang Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan). Telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas digantinya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkantor di Jalan

Merdeka No. 8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah TK I Sumatera Selatan Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna yang baru dengan tugas dan fungsi yang sama maka pada tahun 2013 Biro Keuangan resmi diganti menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan daerah.

### **3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan**

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan BPKAD : H. Akhmad Mukhlis, SE, M.Si.
- b. Sekertaris : Yosi Hervandi, SE, MM. membawahi :
  - 1) Subbagian Perencanaan Dan Informasi : Alen Agustin, SE, M.Si
  - 2) Subbagian Keuangan Dan Aset : Febriany, SE, M,Si.

- 3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian : Arlini Sutrisno, SE.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah : H. Akhmad Mukhlis, SE, M.Si. membawahi :
- 1) Subbidang Anggaran I : Nurul Fatimah, S.Sos.
  - 2) Subbidang Anggaran II : Zainal Abidin, S.E.
  - 3) Subbidang Anggaran III : Bobi Novian, SE, M.Si.
- d. Bidang Pembendaharaan Daerah :
- 1) Subbidang Pembendaharaan I : Febi Maharani, SE, Ak
  - 2) Subbidang Pembendaharaan II : Deszalina Julia, SE, M.Si
  - 3) Subbidang Pembendaharaan III : Sholahuddin, SE, M.Si
- e. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah : Rita Elysa Siregar, SE, membawahi :
- 1) Subbidang Akuntansi I : Anita Mariani, SE, Ak. MM.
  - 2) Subbidang Akuntansi II : Nyimas Fathul Nazily, SE, M.Si.
  - 3) Subbidang Akuntansi III : Ahmad Nashir, SE, Ak.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah : Burkian, S.Sos, M.Si, Membawahi :
- 1) Subbidang Perencanaan Dan Pengawasan Barang Milik Daerah : Lamuda Marbun, SE, M.Si.

- 2) Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah : Angga Ariansyah, S.Si.M.A.B
  - 3) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah : Dante Rama Surya, SE
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Pranata Komputer : Akhmad Hendriansyah, S.Kom
  - 2) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah : Eman Satria, SE,Ak,MM





#### **4. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

##### **Provinsi Sumatera Selatan**

##### **a. Visi**

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yaitu terwujudnya Akuntabilitas engelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional.

##### **b. Misi**

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi yaitu:

- 1) Menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah
- 2) Menciptakan pelayanan prima keuangan dan aset daerah

#### **5. Deskripsi Sampel Penelitian**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan Pemerintah daerah yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dipilih bagi Pemerintah Daerah yang menyajikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti data jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang diterbitkan oleh BPK, Ukuran Pemerintah Daerah (Jumlah Penduduk), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Kompleksitas (Jumlah Kecamatan).

Berikut ini adalah sampel 17 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek dalam penelitian ini, seperti pada tabel IV.1 dibawah ini:

**Tabel VI.1**  
**Sampel Penelitian**

Kabupaten/Kota	Tahun	Kelemahan SPI	Ukuran Pemerintah Daerah	Pendapata Asli Daerah	Belanja Modal	Kompleksitas
Ogan Komering Ulu	2017	16	5,555206	10,90884067	11,30580895	13
	2018	19	5,561411	11,20285386	11,48947992	13
	2019	16	5,566739	11,09689725	11,49505766	13
Ogan Komering Ilir	2017	5	5,908057	11,4900175	11,70236609	18
	2018	14	5,914622	11,55197333	11,48794162	18
	2019	14	5,920202	11,27920405	11,68796562	18
Muara Enim	2017	8	5,791524	11,20940672	11,55142681	20
	2018	11	5,798417	11,23474858	11,63920966	20
	2019	22	5,804518	11,35694951	11,84217559	22
Lahat	2017	9	5,603679	11,12851054	11,59274657	24
	2018	15	5,608103	11,08552521	11,50200345	24
	2019	16	5,612093	11,04597107	11,53453683	24
Musi Rawas	2017	12	5,595919	11,06069784	10,44827026	14
	2018	19	5,602319	11,08587171	11,56727202	14
	2019	23	5,607643	11,14747831	11,57475142	14
Musi Banyuasin	2017	10	5,799196	11,30897727	11,87346293	14
	2018	15	5,806224	11,32783618	12,01952636	15
	2019	13	5,812302	11,45801659	11,81532614	15
Banyuasin	2017	14	5,920971	11,03245419	11,50668784	19
	2018	18	5,927508	11,04388798	11,3763312	21
	2019	11	5,93303	11,13688376	11,80222104	21
OKU Selatan	2017	8	5,547684	10,62833783	11,38847312	19
	2018	14	5,554501	10,62273714	11,50000874	19
	2019	18	5,559911	10,6759936	11,50259567	19
OKU Timur	2017	19	5,821828	10,81147836	11,50661687	20
	2018	18	5,826498	10,86409396	11,5002118	20
	2019	12	5,83064	10,95676746	11,65621217	20
Ogan Ilir	2017	19	5,623015	11,45255561	11,65574184	16
	2018	20	5,628158	11,30869721	11,51929133	16
	2019	16	5,633059	11,05625927	11,46011707	16

Empat Lawang	2017	8	5,387945	10,54817543	11,30036888	10
	2018	25	5,393652	10,62388204	11,36395938	10
	2019	21	5,398747	10,71890202	11,29710556	10
PALI	2017	11	5,266399	10,75529581	11,60525804	5
	2018	29	5,273126	10,91885154	11,90633194	5
	2019	15	5,278895	10,97141401	11,8484573	5
Musi Rawas Utara	2017	12	5,273314	10,53301485	11,46086541	7
	2018	13	5,279261	10,5521695	11,54245549	7
	2019	22	5,284521	10,73743654	11,5386708	7
Palembang	2017	19	6,210345	11,9513426	11,86424746	18
	2018	22	6,217972	12,02350572	12,02233628	18
	2019	22	6,223818	12,2181802	12,08922058	18
Prabumulih	2017	8	5,260377	11,01840932	11,30473946	6
	2018	15	5,269268	11,05712576	11,08169034	6
	2019	20	5,275701	10,98451831	11,24858333	6
Pagar Alam	2017	17	5,135467	10,717055	11,3481733	5
	2018	20	5,139766	10,79314093	11,30437691	5
	2019	21	5,143614	10,64749394	11,29978299	5
Lubuk Linggau	2017	8	5,354112	10,91775723	11,24540677	8
	2018	11	5,361518	11,06037655	11,36928832	8
	2019	9	5,367688	10,96402379	11,45415004	8

Sumber: Penulis 2021

## 6. Hasil Pengolahan Data

### a. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini ada empat variabel independen yaitu variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Belanja Modal (X3), Kompleksitas (X4) sedangkan untuk variabel dependen yaitu Kelemahan Pengendalian Intern (Y).

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menguji pengaruh Ukuran Pmerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan *Statistical Program For Special Science* (SPSS) versi 22. Hasil Analisis yang didapat pada tabel IV.2

**Tabel IV.2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kelemahan Pengendalian Intern Ukuran Pemerintah Daerah	17	28,00	63,00	46,59	9,434
PAD	17	31822620,89	36193028,52	3319305845,00	108408300,177
Belanja Modal	17	3359029,37	35975804,32	2918371461,35	1231569046,758
Kompleksitas	17	15,00	72,00	42,12	18,523
Valid N (listwise)	17				

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

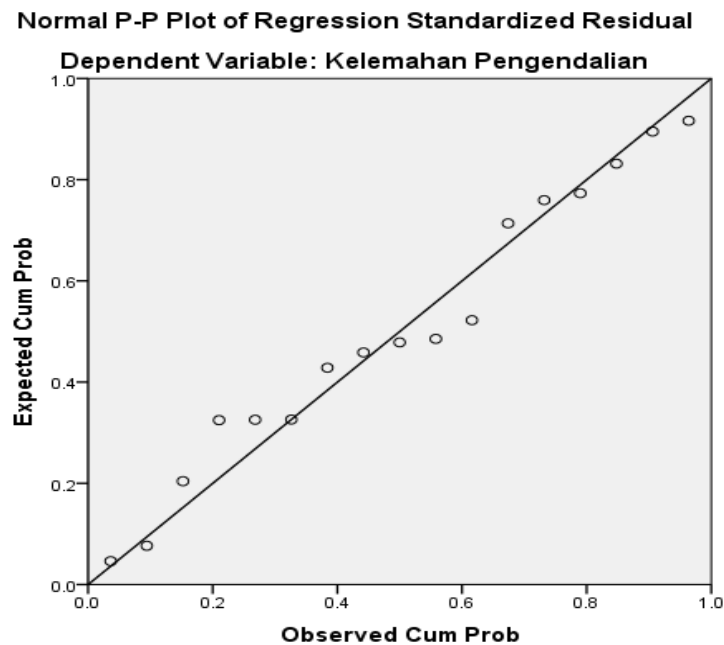
Berdasarkan Tabel IV.2 di halaman sebelumnya. Hasil analisis statistik deskriptif pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah N atau jumlah sampel dari penelitian ini adalah 17. Dan Hasil analisis menunjukkan bahwa Nilai Mean > Nilai Standar Deviation maka dapat disimpulkan data diatas baik.

## **b. Uji Asumsi Klasik**

### **1) Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen terdistribusi secara normal atau tidak. Hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi berganda (*multiple regression*). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen (Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD), Belanja Modal dan kompleksitas pemerintah daerah) terhadap variabel dependen (Kelemahan Pengendalian Intern). Data di dalam penelitian harus memenuhi asumsi kenormalan data. Data penelitian yang baik adalah data yang memenuhi asumsi kenormalan data. Untuk melihat apakah data normal atau tidak dari grafik P-P Plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut ini ditampilkan grafik P-P Plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov* dari variabel penelitian ini disajikan hasil uji normalitas yang dapat dilihat pada gambar IV.1 di halaman berikutnya

**Gambar IV.1**  
**Hasil Penguji Normalitas**



Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Dilihat dari Grafik P-P Plot tersebut menggambarkan bahwa grafik *normal probability* garis observasi mendekati atau menyentuh garis diagonalnya yang berarti nilai residual berdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik.

Untuk lebih memastikan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal, maka peneliti membuat uji *Kolmogorov-Smirnov* yang membuktikan kenormalan suatu data penelitian dengan angka. Peneliti merasa bahwa pembuktian dengan angka akan lebih pasti dibandingkan dengan grafik atau gambar yang bisa menimbulkan banyak persepsi. Dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, suatu data dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 dan apabila nilai

*Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Berikut hasil pengujian dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dapat dilihat pada tabel IV.3 dihalaman berikutnya:

**Tabel IV.3**  
**Hasil Penguji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		17
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,09465496
	Most Extreme Differences	,097
Test Statistic	Positive	,073
	Negative	-,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,198

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Dilihat dari Tabel IV.3 Kolmogorov-Smirnov di atas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* nya sebesar 0,198 yang berarti > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data sudah terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik.

## 2) Uji Multikoneritas

Model regresi yang baik adalah model yang tidak adanya gejala korelasi yang kuat diantara variabel bebasnya pujan multikolinearitas dalam regresi logistik menggunakan matriks korelasi antara variabel



bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel bebas

Uji multikoneritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikoneritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance  $>0.10$  dan nilai VIF  $<10$ , maka data bebas dari gejala multikolineritas. Dapat dilihat pada tabel IV.3 hasil uji multikolineritas sebagai berikut :

**Tabel IV.4**  
**Hasil Penguji Multikoneritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,931	,933		4,140	,679		
Ukuran Pemerintah Daerah	,001	,000	,859	24,659	,000	,237	6,321
PAD	,001	,000	,770	18,984	,000	,402	5,089
Belanja Modal	,001	,000	,699	17,232	,000	,314	7,354
Kompleksitas	,002	,001	,775	21,800	,000	,478	6,675

a. Dependent Variable: Kelemahan Pengendalian Intern

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

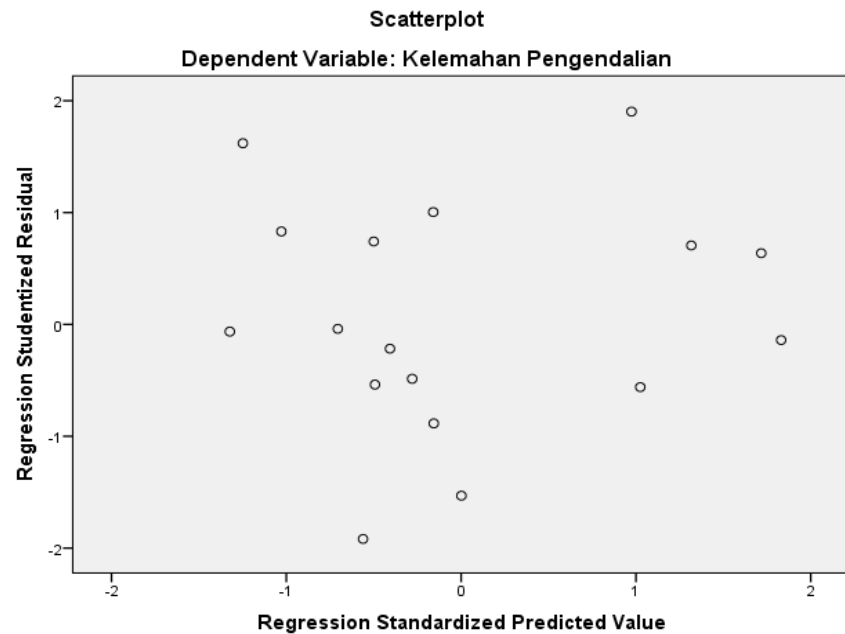
Dilihat pada Tabel IV.4 diatas, hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance lebih kecil dari 0.10 dengan nilai Tolerance masing-masing variabel independen

bernilai Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 0.237, PAD sebesar 0.402, Belanja Modal sebesar 0.314 dan Kompleksitas sebesar 0.778 sementara itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen bernilai Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 6,321 PAD sebesar 5,089, dan Belanja Modal sebesar 7,354 dan Kompleksitas sebesar 4,675. Merujuk hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3) Uji Heterokodesitas

Dalam uji heteroskedastisitas, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas tidak hanya dengan melihat pada Scatter Plot. Selain dengan melihat pada Scatter Plot, ada beberapa metode statistik yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas, seperti halnya uji Glejser. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menguji terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan menggunakan uji Glejser dan Scater Plot. Pada uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser ini, apabila nilai Sig. (signifikansi) dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik ( $p > 0,05$ ), maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Tabel IV.2**  
**Hasil Penguji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Gambar IV.2 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak di pakai untuk variabel bebas lainnya.

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, selain itu yaitu adanya kelembapan, bias spesifikasi model kasus variabel yang tidak dimasukkan, adanya fenomena laba-laba manipulasi data, dan yang terakhir yaitu adanya kelembapan waktu. Salah satu untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin-Watson (DW tes).

**Tabel IV.5**  
**Hasil Pengujian Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567	.065	.689	6,27968	5,348

- a. Predictors: (Constant), Kompleksitas, Belanja Modal, Pad, Ukuran Pemerintah Daerah  
 b. Dependent Variable: Kelemahan Pengendalian Internal  
 Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Nilai pada tabel durbin watson (autokorelasi) dapat dilihat pada output regression pada tabel moderl summary sebesar 5,348, sedangkan nilai dw dengan nilai 0,05 dan jumlah data  $n = 17$  serta  $k = 4$  diperoleh nilai  $DL = 1,1330$  dan  $DU 1,3812$ . Karena nilai dw  $5,348 > dl$ , maka  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

### c. Uji Hipotesis

#### 1) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan untuk menghitung besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel

dependen selain itu analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel perhitungan regresi dibawah ini.

Untuk melihat pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dapat dilihat pada tabel IV.7 dihalaman berikutnya:

**Tabel IV.6**  
**Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,931	,933		4,140	,679		
Ukuran Pemerintah Daerah	,001	,000	,859	24,659	,000	,237	6,321
PAD	,001	,000	,770	18,984	,000	,402	5,089
Belanja Modal	,001	,000	,699	17,232	,000	,314	7,354
Kompleksitas	,002	,001	,775	21,800	,000	,478	6,675

a. Dependent Variable: Kelemahan Pengendalian Intern

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Dari tabel diatas ditemukan persamaan regresi yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 7,931 + 0,001 X_1 + 0,001 X_2 + 0,001 X_3 + 0,002 X_4 + E$$

persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) bernilai positif sebesar 7,931 hal ini mengindikasikan bahwa Kelemahan Pengendalian Internal

mempunyai nilai sebesar 7,931 dengan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kompleksitas.

2. Nilai koefisien regresi variabel Ukuran Pemerintah Daerah 0,001 yaitu artinya menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan searah dengan Kelemahan Pengendalian Intern. Setiap kenaikan Ukuran Pemerintah Daerah 1% maka Kelemahan Pengendalian Intern akan meningkat sebesar 0.001.
3. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,001 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan yang searah dengan Kelemahan Pengendalian Intern. Setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah 1% maka Kelemahan Pengendalian Intern akan meningkat sebesar 0,001.
4. Nilai koefisien regresi Belanja Modal sebesar 0,001 yaitu artinya menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan searah dengan Kelemahan Pengendalian Intern. Setiap kenaikan Belanja Modal 1% maka Kelemahan Pengendalian Intern akan meningkat sebesar 0.001.
5. Nilai koefisien regresi Kompleksitas sebesar 0,002 yaitu artinya menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan searah dengan Kelemahan Pengendalian Intern. Setiap kenaikan Kompleksitas 1% maka Kelemahan Pengendalian Intern akan meningkat sebesar 0,002.

## 2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mendekati 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikat. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.7**  
**Hasil Penguji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.255 <sup>a</sup>	.065	.689	6,27968

a. Predictors: (Constant), kompleksitas, belanja modal, PAD, ukuran pemerintah daerah

b. Dependent Variable: kelemahan pengendalian intern

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Berdasarkan Tabel IV.7 Hasil perhitungan besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0.689 yang berarti bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap variabel dependen adalah 68,9% sedangkan sisanya 31,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

### 3) Uji Simultan (uji F)

Tujuan uji F untuk menguji apakah ukuran pemerintah daerah, PAD, belanja modal dan kompleksitas mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap kelemahan pengendalian intern. Nilai F dalam tabel ANOVA juga untuk melihat apakah model yang digunakan udah tepat atau tidak. Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan dengan program SPSS versi 22 pada halaman berikutnya

**Tabel IV.8**  
**Hasil Pengujian Simultan (f)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	63,740	4	17,398	49,598	.000 <sup>b</sup>
Residual	1125,956	13	24,757		
Total	1118,406	17			

a. Dependent Variable: Kelemahan Pengendalian Internal

b. Predictors: (Constant), Kompleksitas, Belanja Modal, PAD, Ukuran Pemerintah Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Berdasarkan tabel IV.8 hasil uji hipotesis menunjukkan nilai F hitung sebesar 49, 598 sedangkan F tabel untuk taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 5 % serta pembilang ( $k=4$ ), jadi  $k-1=3$  dan di F penyebut =  $n-k-1 = (17-4-1) = 12$  adalah 3,110 sehingga dapat dijelaskan F hitung sebesar  $49,598 > F$  tabel 3,110 dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah



daerah, PAD, belanja modal dan kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

#### 4) Uji Parsial (uji t)

Untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (t test). Jika signifikan lebih kecil dari taraf 10% maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan. Jika lebih besar, variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan signifikan  $t_{hitung}$  dengan ketentuan:

- 1) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha 0,1$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha 0,1$  maka  $H_a$  diterima

**Tabel IV.9**  
**Hasil Pengujian Parsial (uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,931	,933		4,140	,679		
Ukuran Pemerintah Daerah	,001	,000	,859	24,659	,000	,237	6,321
PAD	,001	,000	,770	18,984	,000	,402	5,089
Belanja Modal	,001	,000	,699	17,232	,000	,314	7,354
Kompleksitas	,002	,001	,775	21,800	,000	,478	6,675

a. Dependent Variable: Kelemahan Pengendalian Intern

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 (2021)

Berdasarkan tabel IV.9 di atas menunjukkan nilai t tabel dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) sebesar 10% (0,1) serta  $df = n-k-1 = (17-4-1) = 12$  adalah 1,739. Nilai signifikan t variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian intern sebesar 0,000 dengan menggunakan  $t_{\text{tabel}}$  dengan taraf nyata  $df$   $t_{\text{hitung}} 24,659 > t_{\text{tabel}} 1,739$  dan signifikansi ukuran pemerintah daerah  $0,000 < 0,1$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian intern.

Berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai t tabel variabel PAD sebesar 18,984 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Dapat dilihat bahwa  $t_{\text{hitung}} 18,984 < t_{\text{tabel}} 1,739$  dan signifikansi  $0,000 < 0,1$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai t tabel variabel belanja modal sebesar 17,232 dan signifikansinya sebesar 0,000 yang artinya  $t_{\text{hitung}} 17,232 > t_{\text{tabel}} 1,739$  dan signifikansi belanja modal sebesar  $0,000 < 0,1$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern.

Berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai t tabel variabel kompleksitas sebesar 21,800 dan signifikansinya sebesar

0,000 yang artinya  $t_{hitung} 21,800 > t_{tabel} 1,739$  dan signifikansi kompleksitas sebesar  $0,000 < 0,1$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **a. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Belanja Modal (X3) dan Kompleksitas (X4) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y)**

Hasil uji F menjelaskan bahwa variabel independen, Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Belanja Modal (X3) dan Kompleksitas (X4), mempunyai signifikansi F hitung sebesar 49,598 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05 (Tabel IV.9). Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel independen yang diteliti berpengaruh secara signifikan (bersama) terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian ini sejalan dengan Daniel Simajuntak (2016) menjelaskan bahwa hasil uji F bahwa variabel independen (Ukuran Pemerintah, Kompleksitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Daerah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern) mempunyai signifikansi F hitung sebesar 9.653 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari

0,05 dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

#### **b. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan variabel ukuran pemerintah daerah dengan menggunakan indikator jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal, artinya jumlah penduduk dapat menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar pula pendanaan yang akan digunakan untuk layanan publik dan permasalahan yang timbul dari daerah tersebut semakin kompleks. Maka pemerintah daerah didorong untuk memiliki pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

Penelitian ini sejalan dengan Ika Nurwati dan Rina Trisnawati (2015) Hal ini terlihat dari hasil koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0,005 lebih kecil dibandingkan dengan tarif

signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah (jumlah penduduk) berpengaruh signifikan pada kelemahan pengendalian intern, sehingga hipotesis yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif kelemahan pengendalian intern dapat diterima. Menyatakan bahwa jumlah penduduk yang banyak akan membuat tekanan dan pengawasan terhadap pengendalian intern pemerintah daerah lebih besar. Dengan demikian pemerintah daerah terdorong untuk memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sebagai pertanggung jawaban publik. Hal ini berarti semakin banyak jumlah penduduk harus didukung oleh perkembangan teknologi, informasi yang baik di desa maupun di kota.

**c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal, pendapatan asli daerah memiliki peranan yang penting karena merupakan pemasukan bagi daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan, semakin tinggi jumlah penduduk dalam suatu daerah membuat sumber pendapatan

asli daerah semakin besar sehingga masalah terkait kelemahan pengendalian internal semakin tinggi. Semakin besar pendapatan asli daerah dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan. Kecurangan yang terjadi dapat berupa penggunaan uang daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjurus pada tindak korupsi atau penggelapan. Maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap pendapatan yang diterima.

Penelitian ini sejalan dengan Martani Zaelani (2011) dan Hanifatut Samhah (2018) Hal ini terlihat dari hasil koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0,027 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan pada kelemahan pengendalian intern, sehingga hipotesis yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif kelemahan pengendalian intern dapat diterima. Menyatakan penelitian ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan lebih sulit untuk melakukan pengawasan terhadap pendapatan yang diterima karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengakibatkan meningkatnya resiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab dan juga dapat menyebabkan kelemahan pengendalian intern menjadi meningkat.

#### **d. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal, belanja modal memiliki peranan yang penting yang dimiliki dalam suatu daerah karena merupakan alokasi untuk pengadaan aset tetap. Semakin tinggi jumlah penduduk dalam suatu daerah membuat belanja modal semakin besar sehingga masalah terkait kelemahan pengendalian intern semakin tinggi. Belanja modal yang besar apabila tidak disertai dengan pengendalian intern yang baik dimungkinkan akan banyak terjadi penyalahgunaan sebagai objek korupsi oleh pihak legislatif dan eksekutif yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian intern pemerintah yang berbentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan Ika Nurwati dan Rina Trisnawati (2015) Hal ini terlihat dari hasil koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0,017 lebih kecil dibandingkan dengan tarif

signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan pada kelemahan pengendalian intern, sehingga hipotesis yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif kelemahan pengendalian intern dapat diterima. Menyatakan penelitian ini dapat diartikan bahwa belanja modal bisa menjadi obyek korupsi politik dan administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif. Dikarenakan belanja modal yang tinggi belum tentu sistem pengendalian internnya semakin baik, dengan demikian mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelewengkan belanja modal tersebut.

**e. Pengaruh Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa kompleksitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan variabel kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern, variabel kompleksitas dengan menggunakan jumlah kecamatan sebagai alat ukur. Semakin tinggi jumlah penduduk dalam suatu daerah membuat jumlah cabang kecamatan yang banyak mengakibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih sulit dalam menjalankan pengawasan atas pengendalian intern dan pelaporan keuangan. Maka sebaiknya pemerintah



daerah dapat melaksanakan dan menjalankan pengendalian intern secara konsisten pada setiap area kerja yang berbeda dan pada lingkungan kecamatan yang berbeda pula.

Penelitian ini sejalan dengan Puspitasari (2013) Hal ini terlihat dari hasil koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas berpengaruh signifikan pada kelemahan pengendalian intern, sehingga hipotesis yang menyatakan kompleksitas berpengaruh positif kelemahan pengendalian intern dapat diterima. Penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern yang dijalankan Organisasi akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda dan kesulitan akan muncul ketika akan memulai konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi atau cabang organisasi. Alasan lain yang mendasari adalah pemerintah daerah yang memiliki satuan kerja yang banyak akan memiliki banyak diversifikasi sehingga akan menyebabkan semakin kompleksnya pengendalian intern yang dilakukan. Dengan demikian semakin banyak cabang organisasi maka kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak seperti kesulitan

implementasi sistem pengendalian intern di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah sampai saat pelaporan keuangan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan Penelitian tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian internal. Analisis dilakukan dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22*. Data sampel sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2019. Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kompleksitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
2. Variabel ukuran pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
3. Variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
4. Variabel belanja modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
5. Variabel kompleksitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan Kelemahan pengendalian intern agar berkurangnya kasus temuan akibat kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, semakin maraknya isu tindakan yang merugikan negara sampai triliunan rupiah dan tidak efektifnya pengelolaan keuangan, hal ini terjadi karena tidak adanya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Maka kepala daerah harus semakin meningkatkan pengendalian intern dalam pemerintah daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan jumlah sampel yang besar dan mungkin akan memberikan hasil yang berbeda juga.
4. Bagi penelitian selanjutnys selain data sekunder juga menggunakan data lain, seperti kuesioner ataupun interview ke kantor pemerintah atau institusi pemerintah lain untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai keberadaan pengendalian intern pada Pemerintah daerah.

